

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD 1945 Amandemen IV.
- _____. *Undang-Undang tentang Kejarantinaan Kesehatan*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.
- _____. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- _____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Lembaran Negara Nomor 227.
- _____. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka PERCEPATAN Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Lembaran Negara Nomor 91 Tahun 2020.
- _____. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- _____. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali*.
- _____. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi*

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali.

B. Buku

Isbaniah, Fathiyah, dkk. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2020.

Sasmito, Joko. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang : Setara Press, 2018.

Sutanto. *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota POLRI*, Jakarta: Kepolisian Negara RI, 2006.

Hadjon, Philipus M, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008.

Kleden, Marianus. *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal*. Yogyakarta : Lamalera, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana, 2009.

Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Klaten : Penerbit Lakeisha, 2021.

Robertson, Geoffrey. *Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komnas HAM : Jakarta, 2002,

Kaelan, Zubaidi, Achmad. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta Paradigma, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok : Rajawali Pers, 2020.

Aidah, Siti Nur. *Kitab Sejarah COVID-19*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Christiawan, Rio. *Politik Hukum Kontemporer Covid dan Normal Baru Hukum*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Sabarisman, Muslim, dkk. *Ketepatan Sasaran dan Nilai Kemanfaatan Bantuan Sosial Sembako di Jabodetabek*. Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI, 2020.

Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

C. Lain-lain

Sukur, Moch Halim, dkk. "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan". *Journal Incio Legis*, Vol. 1 No.1, 2020. Tersedia di: <https://journal.trunojoyo.ac.id/>. Diakses pada tanggal 1 April 2022.

Nurita, Dewi, Amirullah. "Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya?". Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2022.

Sibuea, Harris Y. P. "Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali". *Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI*, Vol.XII No. 1, 2021. Tersedia di: <https://berkas.dpr.go.id/puslit/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

Bramasta Dandi Bayu, Hardiyanto Sari. "Mengenal Apa Itu PPKM Darurat dan Bedanya dengan PPKM Mikro". Tersedia di: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/130657765/>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2022.

Chakim, M. Lutfi. "Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik Dalam Konstitusi, ICCPR, DUHAM dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM". Tersedia di: <http://www.lutfichakim.com/2011/08/ruang-lingkup-hak-sipil-dan-politik.html>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2022.

Subawa, I Made. "Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945". *Jurnal Kertha Partika*, Vol. 33 No. 1, 2008. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id>. Diakses pada tanggal 14 mei 2022.

Kusnadi, "Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)". Tersedia di: <http://repository.ut.ac.id/>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2022.

Ayuni, "Makna HAM Amat Bergantung Pada Para Penafsirnya - Catatan INSISTS Saturday Forum (ISF) 30/06/2018". Tersedia di: <https://insists.id/>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2022.

Wahyudi, Teguh Agus. "Bagaimana Kondisi HAM di Indonesia". Tersedia di: <https://www.kompasiana.com/>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2022.

Hakim, Rakhmat Nur. "Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro". Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

Fajarta, Carlos Roy. "Kenali Perbedaan PSBB, PPKM dan Karantina Wilayah". Tersedia di: <https://nasional.okezone.com/>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

Ristyawati, Aprista "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945". *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 No. 2, 2020. Tersedia di : <https://ejournal2.undip.ac.id/>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

Wardhani, Nurwidya Kusma Wardhani. "Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM". *Jurnal Ubaya*, Vol.2 No.1, 2021. Tersedia di: <https://journal.ubaya.ac.id/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

Franedy, Roy. "Apa Itu PSBB, Obat Corona yang Segera Berlaku di Jakarta". Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

Hairi, Prianter Jaya. "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19". *Jurnal Info Singkat*, Vol. 12 No. 7, 2020. Tersedia di: <https://berkas.dpr.go.id/>. Diakses pada 20 Juni 2022.

Nasruddin, Rindam. Haq, Islamul. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah". *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 7 No.7, 2020. Tersedia di: <https://journal.uinjkt.ac.id/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

Herdiana, Dian "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 2, 2020. Tersedia di: <https://www.researchgate.net/>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2022.

Aulia, Nurul Rahmi, dkk. "Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan". *Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 4 No. 1, 2021. Tersedia di: <https://jurnal-umbuton.ac.id/>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2022.

Fauzi, Ahmad. "Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi COVID-19". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 16 No. 1, 2020. Tersedia di: <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2022.

Ibrahim, Igman. "Angka Kriminalitas Meningkat 38,4Persen di PSBB Masa Transisi". Tersedia di: <https://www.tribunnews.com/nasional/>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

Putra, I Gede Gita Ananda, dkk. "Pelaksanaan kebijakan Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kerobokan Denpasar", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 No. 1. Tersedia di: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

Hastuti, Pebri, dkk. "Tinjauan Kebijakan Pemberlakuan Lockdown, PHK, PSBB, Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19 Terhadap Stabilitas Sistem Moneter". Tersedia di: <http://digilib.unimed.ac.id/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022.

Usman, "Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelanggar PSBB". Tersedia di: <https://law.unja.ac.id/sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelanggar-psbb/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.

Dzulfaroh, Ahmad Naufal Ddzulfaroh. "Sanksi Pelanggar PSBB DKI Jakarta Apakah Efektif?". Tersedia di: <https://www.kompas.com/>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

Nafi'an, Muhammad Ilman. "Ini Alasan Pemprov DKI Hapus Denda Sanksi Progresif Bagi Pelanggar PSBB". Tersedia di:

<https://news.detik.com/berita/d-5341939/>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.

Saidah, Dede. "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di DKI Jakarta". *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 12 No. 2, 2020. Tersedia di: <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

Anas, Azwar "Transformasi Bantuan Sosial Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat". *Jurnal Inovasi Aparatur*. Vol. 3 No. 1, 2021. Tersedia di: <https://ejournal-bpsdm.jakarta.go.id/>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

Kabar Latuharhary, "PSBB dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Tersedia di: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/4/11/1365/psbb-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.html>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

Siaran Pers, "Penanganan Wabah Pandemi Virus COVID-19 dan Penerapan PSBB di JABODETABEK Harus Memperhatikan Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Hak Warga". Tersedia di: <https://bantuanhukum.or.id/penanganan-wabah-pandemi-virus-covid-19-dan-penerapan-psbb-di-jabodetabek-harus-memperhatikan-hak-asasi-manusia-dan-pemenuhan-hak-warga/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

Stefanle, Christie. "Komnas HAM surati Anies agar Tak Sanksi Pidana Pelanggar PSBB". Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200408154627-20-491694/>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

Persatuan Jaksa Indonesia, "Kabag Hukum Dan HAM Kota Bogor, Analisis Yuridis Perwali 37/2020 Tentang Sanksi Pelanggar PSBB". Tersedia di: <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

Gumay, Akbar Nugroho. "PHK dan Pekerja yang Dirumahkan Tembus 2,8 Juta Karena Corona". Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413165953-92-493114/>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

- Lova, Chyntia. "Denda Pelanggar PSBB di Jakarta Terkumpul Rp. 4,9 Miliar". Tersedia di: <https://megapolitan.kompas.com/>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.
- Warta Infem, "Cara Mengajukan Permohonan Penetapan PSBB Untuk Solusi COVID-19". Tersedia di: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.
- Iqbal, Muhammad. "Daftar Daerah yang Ditolak Terawan untuk Lakukan PSBB.". Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.
- Amrynudin, Anin Dhita Kiky. Katharina, Riris. "Birokrasi dan Kebijakan Penanganan COVID-19". Tersedia di: <https://berkas.dpr.go.id/>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.
- Himam, Iqozul, dkk. "Aspek Hukum PSBB dan PPKM Dalam Penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan." *Jurnal Disreksi*, Vol. 1 No. 1. Tersedia di: <https://journal.unram.ac.id/>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.
- Ruhyana, Nanang. "Implementasi Nilai Ketaatan Hukum Pada Masa Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Dalam Rangka Menurunkan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)", *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Vol. 9 No. 2. 2021. Tersedia di: <https://jurnal.lemhannas.go.id/>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.